



INDONESIAINDICATOR

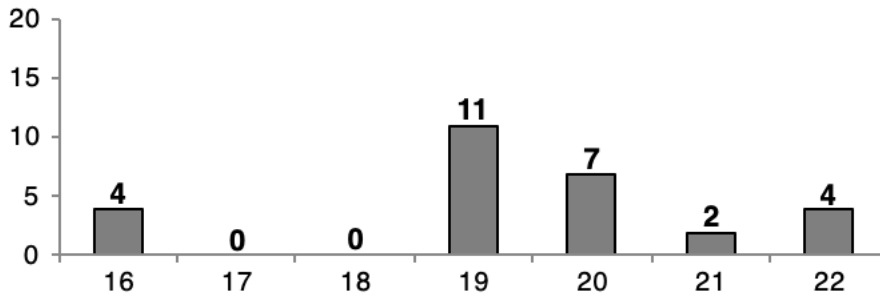
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(22 Mei 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	2	2	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 22 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	22 Mei 2025	Suara Merdeka	Kadin Jateng Jamin Investasi Bebas Premanisme	2	Positive	
2	22 Mei 2025	Suara Merdeka	Gubernur Komit Kembangkan Ekonomi Kreatif	3	Positive	
3	22 Mei 2025	Suara Merdeka	Dewan Minta Infrastruktur Ditangani	9	Positive	
4	22 Mei 2025	Jateng Pos	Realisasi Investasi Jateng Rp 21,85 Triliun	12	Positive	

Title	Kadin Jateng Jamin Investasi Bebas Premanisme		
Media	Suara Merdeka	Reporter	cun-52
Date	2025-05-22	Tone	Positive
Page	2	PR Value	



SM/Cun Cahya

INVESTASI: Kadin Jawa Tengah bersama kabupaten kota melakukan deklarasi komitmen menjaga kondusivitas investasi di Jawa Tengah. (52)

Kadin Jateng Jamin Investasi Bebas Premanisme

SEMARANG- Kadin Jawa Tengah mempunyai komitmen untuk membuat iklim investasi menjadi kondusif. Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Harry Nuryanto mengatakan selama ini iklim investasi di Jawa Tengah sudah sangat kondusif.

"Kadin di Kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah ada satu ikatan atau suatu paguyuban sehingga koordinasi ini semakin solid untuk bisa saling menjaga iklim investasi," katanya saat memberikan komitmen menjaga iklim investasi bersama Kadin kabupaten kota di Hotel Grasia Semarang, Rabu, 21 Mei 2025.

Harry menegaskan tidak ada praktik premanisme yang menyasar ke industri Jawa Tengah. Kawasan industri yang ada di Jawa Tengah juga membuka

peluang untuk kontestasi ke pengusaha lokal untuk mengikuti tahapan yang sesuai dengan aturan.

Apalagi Kadin didukung oleh Gubernur Jawa Tengah **Ahmad Luthfi** yang selalu berkomitmen membawa investor ke Jawa Tengah termasuk dengan keamanan dan kenyamanannya.

Menjadi Solusi

"Gubernur Jawa Tengah mantan Kapolda menjamin kondusivitas keamanan artinya bisa menjaga itu," ucapnya.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kukrit SW menambahkan Kadin kabupaten kota di Jawa Tengah harus selalu hadir menjadi part of the solution untuk setiap permasalahan yang ada. "Jangan sampai Kadin hadir menjadi part of the problem, jangan sampai Kadin hadir membuat ruwet," katanya.

Apalagi sekarang Jawa Tengah menjadi primadona investasi untuk investor-investor China.

"Saya rasa isu premanisme di Jawa Tengah tidak terlalu mendominasi dan masih bisa dikendalikan," katanya.

Kukrit berharap Kadin harus tampil di depan untuk memperjuangkan dan mensukseskan investasi di Jawa Tengah, karena jika investasinya maju maka akan ada multiplayer yang besar di belakangnya. (cun-52)

Title	Gubernur Komit Kembangkan Ekonomi Kreatif		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd
Date	2025-05-22	Tone	Positive
Page	3	PR Value	

Gubernur Komit Kembangkan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah **Ahmad Luthfi** menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai salah satu tulang punggung perekonomian di wilayahnya. Komitmen itu diperkuat dengan sinergisitas dan rencana bersama yang dijalin dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Ekonomi kreatif ini salah satu tulang punggung ekonomi di Jawa Tengah. Ekonomi kreatif akan menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain sehingga potensi ini harus kita garap," kata Ahmad Luthfi usai bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Selasa malam, (20/5).

Heterogenitas masyarakat Jawa Tengah secara tidak langsung menciptakan peluang dan potensi ekonomi kreatif yang beragam. Kesempatan kerja yang terbuka dapat diisi dari heterogenitas masyarakat itu, seperti potensi bidang jasa, boga, kriya, fesyen, dan lainnya. "Secara teknis beliau (Menekraf) akan melakukan bimbingan di tempat kita dengan berbagai even-even yang dilakukan di tempat kita," katanya.

Ahmad Luthfi mengatakan, salah satu even yang menjadi perhatian Menteri Ekonomi Kreatif adalah penyelenggaraan Solo Raya Great Sale. Even tersebut memang digadang-gadang sebagai langkah untuk menciptakan dan menumbuhkan perekonomian baru melalui sektor ekonomi kreatif. "Di tempat kita akan terus dilakukan dan beliau akan datang ke tempat kita," ujarnya.

Langkah Pengembangan

Selama ini, Pemprov Jateng sudah memulai langkah aksi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Di antaranya dengan mengembangkan SDM pelaku ekonomi kreatif, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, disertai sertifikasi bagi pelaku ekonomi kreatif, dukungan sosialisasi dan sertifikasi HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), menjembatani pembentukan Kab/Kota Kreatif di Jawa Tengah (melalui PMK3I), mendorong pembentukan KEK Kab/Kota di Jawa Tengah, dan memberi ruang kepada pelaku ekraf untuk berekspresi, bersinergi, membangun jejaring melalui event secara regular Semarak KaTa Kreatif (sejak 2023).

Pada 31 Oktober 2014, Pekalongan dan Kota Surakarta ditetapkan sebagai Unesco Creative Cities Network (UCCN) di sektor Kriya dan Seni Budaya. Selanjutnya, sebanyak 17 kabupaten/kota kreatif di Jateng telah teruji petik PMK3I. Antara lain Kota Salatiga (kuliner aneka olahan singkong), Kebumen (Film, Animasi dan Video), & Kota Surakarta (Seni pertunjukan tari dan wayang).

Selain itu sebanyak 12 kabupaten/kota (KaTa) Kreatif di Jateng telah ditetapkan oleh Kemenparekraf. Antara lain Kota Surakarta (seni pertunjukkan), Kota Semarang (Fashion), Kabupaten Rembang (Kriya) dan Kabupaten Banjarnegara (Kuliner). Juga sebanyak 27 kabupaten/kota di Jateng telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif.

Meski demikian dalam perjalanannya pengembangan ekonomi kreatif masih menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah nomenklatur perangkat daerah yang mengampu ekonomi kreatif di daerah masih berbeda-beda. Termasuk belum terintegrasinya program atau kebijakan pengembangan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot. "Menteri Ekonomi Kreatif sangat berharap sekali nanti nomenklatur ekonomi kreatif disesuaikan dengan dinas yang kita miliki," kata Ahmad Luthfi. (ekd)

Title	Dewan Minta Infrastruktur Ditangani		
Media	Suara Merdeka	Reporter	G22-44
Date	2025-05-22	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Dewan Minta Infrastruktur Ditangani

■ Penopang Ketahanan Pangan

SEMARANG - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dinilai sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan di antaranya melalui pemberdayaan dan ketahanan pangan.

Demikian dikatakan wakil ketua DPRD Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Setya Arinugroho.

"RPJMD di masa Gubernur Ahmad Luthfi ini harus mampu menjawab persoalan-persoalan konkret di lapangan, seperti kemacetan distribusi hasil pertanian hingga tingginya biaya logistik. Begitu pula soal infrastruktur wilayah yang sebagian belum tertangani dengan baik dan merata di wilayah Jateng," kata Ari, Rabu (21/5).

Wakil rakyat asal Banyumas ini menilai, infrastruktur harus terintegrasi dengan pemetaan wilayah pangan, termasuk memastikan irigasi berjalan dengan baik dan proses pengolahan hasil pertanian berjalan dengan baik.

"Kita harus pikirkan rantai pasoknya secara end-to-end supaya tidak ada lagi kendala distribusi dan mahalnya biaya logistik petani," katanya.

Melalui RPJMD 2025-2029, dia berharap percepatan infrastruktur penunjang proses produksi sampai distribusi benar-benar menjadi katalis ketahanan pangan Jateng. Diharapkan hal itu bisa mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Terintegrasi

"Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi pertanian, tapi menyangkut sistem distribusi, infrastruktur proses, hingga konektivitas antar wilayah. Oleh karenanya kami berharap peningkatan infrastruktur yang memadai dapat menjadi katalis terwujudnya ketahanan pangan Jateng," tegas Ari.

Lebih lanjut dia mengatakan, ketersediaan infrastruktur harus dijenjot. Meski demikian pembangunannya tidak boleh asal-asalan atau



SM/dok

PIMPIN PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Setya Arinugroho saat memimpin rapat paripurna DPRD baru-baru ini. (44)

serampangan. Karena itu, dia menekankan pentingnya integrasi antara proyek infrastruktur dengan pemetaan wilayah lumbung pangan.

Masalah kemiskinan di Jawa Tengah, kata dia, juga perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya pada tahun 2024 kemiskinan Jateng tercatat mencapai 9,58 persen. Dia berharap integrasi antara peningkatan infrastruktur dan ketahanan pangan dapat membawa dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 pada angka 9,58 persen. Ini adalah isu serius yang harus diatasi. Saya optimis integrasi pembangunan infrastruktur yang masif dengan penguatan ketahanan pangan akan memberikan dampak signifikan untuk penurunan angka tersebut," katanya.

Namun, Ari menyadari bahwa mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan tak dapat dilakukan secara instan. Hal itu hanya mungkin diupayakan melalui sinergi lintas sektor yang sehat. Baik antara legislatif dan eksekutif, hingga pelibatan masyarakat sebagai mitra pembangunan. (G22-44)

Title	Realisasi Investasi Jateng Rp 21,85 Triliun		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-05-22	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Realisasi Investasi Jateng Rp 21,85 triliun

Duet Ahmad Luthfi-Gus Yasin Triwulan I Tahun 2025

SEMARANG – Duet kepemimpinan gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Gus Yasin di Jawa Tengah menggembirakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah (Jateng) mencatatkan, realisasi kinerja investasi di Jateng pada triwulan I 2025, senilai Rp21,85 triliun. Angka ini naik Rp 4,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun

2024, dari capaian Rp17,56 triliun.

Kepala DPMPSTP Jateng, Sakina Rosellarsari, mengatakan, dari capaian triwulan I 2025, penanaman modal asing (PMA) berkontribusi sebanyak 64% pada angka Rp14,08 triliun. Kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 36% senilai Rp7,77 triliun.

“Penyerapan tenaga kerja mencapai 97.550 orang, serta penambahan jumlah proyek 20.431,” kata dia dalam evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2024 Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu, 14 Mei 2025.

Adapun lima besar realisasi sektor investasi di Jateng pada Triwulan I 2025, mulai dari industri tekstil (Rp2,66 triliun), industri barang dari kulit dan alas kaki (Rp2,51 triliun), industri karet dan

plastik (Rp2,45 triliun), industri makanan (Rp1,97 triliun), serta perumahan, dan Kawasan industri perkantoran (Rp1,83 triliun).

Lebih lanjut, dalam rapat evaluasi tersebut mengundang Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin untuk menyampaikan arahan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, sebagai narasumber, serta 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jateng sebagai peserta.

Adapun tujuan rapat untuk mendapatkan arahan dari Wakil Gubernur Jateng dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, perizinan dalam rangka pelayanan perizinan prima, serta pelaksanaan evaluasi perizinan tahun 2024.

Khusus capaian tahun lalu (2024), Sakina memaparkan, rekapitulasi izin usaha yang telah diterbitkan sepanjang



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakilnya Gus Yasin.

tahun meningkat 22,9% dari tahun sebelumnya. Angkanya mencapai 53.550 izin yang dikeluarkan di Jateng.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, memberikan arahan supaya dinas terkait saling berkomunikasi dan berkolaborasi, serta disiplin verifikasi dan validasi sesuai regulasi yang ada dalam menerbitkan perizinan di Jateng. Jangan sampai izin usaha yang terbit menimbulkan keresahan di

aturan agar memberi layanan informasi makanan halal (halal food), dan (non halal). Metode seperti ini, kata Taj Yasin, telah diterapkan di sejumlah negara yang memberikan layanan pariwisata ramah muslim.

“Kalau di Indonesia bisa dijelaskan (informasi) non halal corner. Supaya jelas terkait pariwisata ramah muslim. Kalau di food court ada non halal corner, maka supaya jelas (pelaksanaan) regulasinya,” katanya.

Begitupun juga pada sektor hiburan yang masih terkait dengan pariwisata. Taj Yasin mencontohkan, usaha karaoke, hingga ber-niaga minuman beralkohol supaya tidak berada di lingkungan di tengah perkampungan yang memicu pro kontra masyarakat. Lebih dari itu, pengusaha juga tidak menempatkan atau display minuman beralkohol yang

mencolok terlihat dari luar.

Kemudian pada sektor industri padat karya, Taj Yasin mengaku mendapati masukan terkait fasilitas umum (fasum) tempat ibadah yang belum memadai secara kuantitas tampungannya. Pada akhirnya para pekerja harus antri dalam beribadah, sehingga memicu keterlambatan kembali masuk bekerja.

“Permasalahan lanjutannya yang saat ini muncul yakni pemotongan gaji atau denda oleh perusahaan. Setelah saya diskusi dengan berbagai pihak, salah satu faktornya ketika istirahat siang. Karyawan muslim tidak hanya menggunakan waktu istirahat untuk makan, akan tetapi juga beribadah salat zuhur. Lebih dari itu, pengusaha juga tidak menempatkan atau display minuman beralkohol yang